Research Article

***Ryōsai Kenbo*: Domestikasi Perempuan dan Pembentukan Negara Bangsa dalam Era Meiji Jepang**

Nisia Nur Dwi Agusta*, Tribuana Tungga Dewi

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

nisiaagusta@lecturer.undip.ac.id

Received: 15-01-2025; Revised: 27-05-2025; Accepted: 27-05-2025

Available online: 30-06-2025; Published: 30-06-2025

Abstract

During the Meiji era, Japan undertook rapid modernization to compete with Western powers. One of the cultural strategies employed by the government was the promotion of the *ryōsai kenbo* ideology—"good wife, wise mother"—to shape ideal women as domestic supporters of national progress. This study explores the development of *ryōsai kenbo* as a state policy in women's education, from the Charter Oath of 1868 and the Iwakura Mission to the Imperial Rescript on Education (1890) and the Girls' High School Order (1899). Using a qualitative historical approach, the research analyzes how *ryōsai kenbo* reflected Japan's effort to establish a functional and harmonious society, as explained through Talcott Parsons' structural-functional theory. Findings show that although the ideology confined women to domestic roles, it simultaneously legitimized women's access to education and redefined their societal significance. Rather than viewing *ryōsai kenbo* solely as a tool of subjugation, this article argues it was a strategic effort to construct a cohesive national identity through clearly defined gender roles. Thus, the ideology served both as a means of female domestication and a pillar of Japan's modernization agenda.

Keywords: *Ryōsai kenbo*; Ideology; Japanese girls; Meiji period; Japan.

1. Pendahuluan

Jepang dikenal sebagai negara patriarki, menurut Mashiri (dalam You, 2021) patriarki bukan suatu tatanan masyarakat yang menunjukkan laki-laki sebagai sosok yang mendominasi, melainkan laki-laki sebagai sosok yang mampu mengendalikan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Laki-laki sebagai sosok yang mengendalikan perempuan salah satunya terlihat pada saat Tokugawa berkuasa. Era Tokugawa mewajibkan masyarakat untuk memeluk agama Buddha dan memahami ajaran Konfusianisme yang cenderung menjadikan wanita sebagai subordinasi. (Humairah & Dewi, 2025)

Agama Buddha memasuki Jepang pada abad keenam dan membawa ajaran Konfusianisme (Bowring, 2005). Kitab Ritus yang berisi tentang ketaatan

perempuan terhadap laki-laki, menuliskan bahwa perempuan merupakan seorang pengikut (*cong*). *Cong* (從 atau 从) dalam bahasa Mandarin berarti mengikuti, menemani, pengikut, atau bahkan pembantu. Dalam bahasa Jepang, kanji 從 dibaca sebagai 従う (*shitagau*) yang termasuk ke dalam golongan kata kerja dan memiliki arti mengikuti, mematuhi, atau tunduk.

Atas dasar hal tersebut, ketika perempuan masih kecil harus menaati ayahnya, kemudian ketika menikah harus menaati suaminya, dan mereka harus menaati anak laki-laknya ketika suami mereka meninggal (Clark & Wang, 2004).

Ajaran Konfusianisme terus menguat dan mengalir dalam pola pikir masyarakat Jepang yang kemudian menjadi paham bahwa para perempuan harus mematuhi laki-laki, dimulai dari ayahnya, suaminya,

sampai anak laki-lakinya. Ajaran Konfusianisme yang telah masuk sejak abad keenam di Jepang juga mengalami berbagai perubahan karena adanya ajaran Shinto yang sejak awal dianut oleh masyarakat Jepang. Menguatnya ajaran Konfusianisme menyebabkan ruang gerak para perempuan semakin dibatasi terutama ketika di bawah Keshogunan Tokugawa.

Namun, peran dan tugas para perempuan mulai berubah ketika Jepang memasuki zaman Meiji pada 1868. Setelah kebijakan *sakoku* (鎖国) atau penutupan negara dicabut, Jepang dihadapkan dengan berbagai perubahan yang dibawa oleh negara Barat, mulai dari teknologi, kebijakan, kebudayaan, cara hidup, hingga pendidikan.

Ketertinggalan Jepang membuat pemerintah harus berinovasi agar tidak kalah saing dengan negara-negara Barat dalam bidang industrialisasi, salah satunya melalui ideologi yang dibuat untuk para perempuan. Pemerintah Jepang membentuk ideologi *ryōsai kenbo* agar perempuan Jepang menjadi sosok ideal, yaitu seorang istri yang baik dan ibu yang bijaksana, dan memberikan pengaruh manfaat pada negara Jepang

Berbagai penelitian tentang *ryōsai kenbo* telah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah skripsi milik Novianti (2015) dengan judul *Peranan Wanita Jepang Sebagai Ryōsai kenbo pada Zaman Meiji* yang fokus terhadap peran wanita Jepang pada zaman Meiji sebagai *ryōsai kenbo* dan bagaimana pelaksanaan *ryōsai kenbo* pada masyarakat Jepang saat itu. Novianti menyebutkan bahwa wanita sebagai *ryōsai kenbo* berperan penting dalam melaksanakan upacara pemujaan leluhur dan berugas untuk menciptakan keharmonisan di lingkungan tetangga maupun tempat suami mereka bekerja. Novianti juga menjabarkan bagaimana dampak dari *ryōsai kenbo* terhadap para wanita, yaitu membatasi peran para wanita hanya di lingkungan domestik.

Penelitian lainnya yang membahas tentang *ryōsai kenbo* adalah artikel dengan judul *Developments in Female Education in Meiji Japan as Seen from Jogaku Zasshi's Editorials by Iwamoto Yoshiharu* karya Lukminaita (2015). Lukminaita menggunakan opini milik Iwamoto Yoshiharu dalam *Jogaku Zasshi* untuk menjabarkan perkembangan pendidikan wanita pada zaman Meiji yang berkaitan erat dengan *ryōsai kenbo*. Di sisi lain, Patessio (2013) dengan artikelnya yang berjudul *Women Getting a 'University' Education in Meiji Japan: Discourse, Realities, and Individual Lives* memaparkan bagaimana para tenaga pendidik seperti Naruse Jinzo dan para perempuan seperti Haraguchi Tsuruko mencari kesempatan untuk menuntut ilmu hingga ke tingkat universitas di saat pemerintah Jepang akhirnya menerapkan *ryōsai kenbo* dalam pendidikan perempuan pada akhir zaman Meiji (1890-1912). Pada awal zaman Meiji, hampir tidak ada kesempatan bagi para perempuan untuk dapat berkonsultasi, berkunjung, mengirim surat atau bahkan belajar dari seorang dokter wanita Jepang. Namun, setelah keberhasilan para wanita seperti Yoshioka Yayoi, Tsuda Umeko, Ninomiya Teiko, dan Haraguchi Tsuruko yang menuntut ilmu hingga ke tingkat universitas, membuat para perempuan menjadikan mereka sebagai sosok ideal.

Penelitian terdahulu tentang *ryōsai kenbo* banyak membahas bagaimana *ryōsai kenbo* membatasi peran perempuan hanya di lingkungan domestik atau domestikasi perempuan. Pada penelitian ini penulis tidak hanya menjelaskan tentang domestikasi perempuan namun akan menjelaskan *ryōsai kenbo* sebagai ideologi pembentukan negara bangsa dalam era Meiji. Penelitian ini bermaksud untuk membahas sisi lain dari *ryōsai kenbo*, bagaimana ideologi *ryōsai kenbo* yang dibentuk oleh pemerintah memberikan peran perempuan untuk ikut serta memajukan negara Jepang di tengah

ketertinggalannya dari negara-negara Barat pada zaman Meiji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan perkembangan ideologi *ryōsai kenbo* yang diterapkan dalam pendidikan perempuan pada zaman Meiji. Penelitian ini menggunakan teori struktural-fungsional dari Talcot Parsons.

Teori struktural-fungsional lahir dari teori *nature* yang melihat bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu kodrat karena perbedaan biologis, sehingga membuat keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda. Akibatnya, para laki-laki cenderung dianggap lebih unggul dan memiliki peran utama dalam masyarakat, sementara para perempuan dianggap terbatas secara biologis sehingga berperan sebagai sub-ordinat dalam masyarakat (Dalimoenthe, 2020; Utaminingsih, 2017).

Megawangi (2014) menyatakan bahwa kedudukan seseorang dalam struktur sosial akan menentukan fungsi yang berbeda. Struktur dan fungsi tersebut tidak akan lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang menjadi landasan sistem masyarakat tersebut. Masyarakat yang terstruktur merupakan buah pikir milik Plato yang menyampaikan bahwa sebuah negara harus dibentuk oleh tiga bagian, yaitu penguasa (rulers), para asistennya (auxiliaries), dan para pekerja (laborers). Syarat dari terbentuknya sebuah negara yang kondusif adalah ketika setiap bagian tersebut bekerja secara harmonis dan memahami posisinya masing-masing.

Teori struktural-fungsional membagi peran antara pria dan wanita dalam masyarakat, khususnya keluarga. Pria bertugas sebagai pemburu (hunter) yang diharap untuk bekerja di luar rumah dan membawa makan (nafkah) bagi keluarga, sementara perempuan cenderung terbatas di lingkungan rumah, yaitu untuk melahirkan keturunan, mengurus, dan menyusui anak. Pembagian peran yang seimbang, selaras, dan serasi akan menciptakan kondisi keluarga yang kuat

dan berwibawa, kemudian menciptakan masyarakat yang stabil (Megawangi, 2014; Utaminingsih, 2017). Teori struktural fungsional digunakan guna melihat keterkaitan peran perempuan, *ryōsai kenbo* dalam upaya pemerintah Jepang mengejar ketertinggalan dari bangsa Barat pada zaman Meiji.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Abdussamad (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang fokus untuk menjelaskan suatu keadaan, maupun hakikat nilai suatu objek atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif ini bersifat studi pustaka atau studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis melalui buku, jurnal, majalah, atau sumber lainnya.

Sumber primer dalam penelitian ini, yaitu buku berjudul *Ryōsai Kenbo: The Educational Ideal of "Good Wife, Wise Mother" in Japan* karya Shizuko Koyama (2013) yang diterjemahkan oleh Stephen Filler, buku *Women and Public Life in Early Meiji Japan: The Development of the Feminist Movement* karya Mara Patessio (2011), buku *Gendering Modern Japanese History* yang disunting oleh Barbara Molony dan Kathleen Uno (2005), dan buku *Educational Thought and Ideology in Modern Japan: State Authority and Intellectual Freedom* karya Teruhisa Horio (1933). Sumber sekunder seperti buku-buku tentang sejarah Jepang pada zaman Meiji hingga zaman Taisho khususnya *ryōsai kenbo*, artikel dalam jurnal, tulisan, majalah, gambar, dan lain-lain yang dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah Jepang juga digunakan.

Di sisi lain, Gottschalk (Herlina, 2020) mengungkapkan bahwa metode penelitian sejarah adalah sebuah langkah pengujian dan analisis rekaman atau peninggalan sejarah secara kritis. Garraghan (Wasino & Hartatik, 2018) juga menyampaikan bahwa metode penelitian

sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan sumber sejarah secara efektif, dalam menilai atau mengujinya secara kritis, dan disajikan dalam bentuk tulisan dari hasil-hasil yang dicapai.

Metode penelitian sejarah terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap heuristik, tahap interpretasi, dan tahap historiografi (Abdurrahman, 2007). Tahap heuristik merupakan tahap awal penelitian sejarah dengan melakukan pencarian sumber-sumber keterangan atau bukti sejarah. Pencarian sumber sejarah dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan tokoh atau saksi sejarah atau juga dengan membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Pada tahap interpretasi, fakta-fakta ditafsirkan dan dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Sikap objektif diperlukan ketika melakukan penafsiran fakta untuk menghindari tafsiran yang berbeda, namun juga diperlukan sikap subjektif yang rasional. Fakta-fakta yang telah ditafsirkan kemudian disusun secara kronologis sehingga menjadi rangkaian yang sistematis dan logis.

Tahap akhir pada penelitian historis adalah tahap historiografi, yaitu pemaparan atau penulisan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian sejarah disampaikan dalam bentuk cerita sejarah yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan dibuktikan keasliannya. Menurut Abdurrahman (2007), penyajian dari penelitian sejarah secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dinamika Politik pada Awal Zaman Meiji

Kebijakan *sakoku* pada zaman Edo di bawah kepemimpinan Tokugawa Iemitsu melarang masyarakat Jepang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, maupun perjalanan kembali dari luar negeri ke Jepang. Selain itu, Tokugawa juga

melarang penyebaran agama Kristen dan perdagangan ke luar negeri ditutup.

Restorasi Meiji (明治維新) merupakan salah satu peristiwa sejarah terbesar di Jepang yang menjadi penanda bahwa zaman Edo telah berakhir. Kekuasaan dikembalikan kepada Kaisar pada Restorasi Meiji. Pengembalian kekuasaan tersebut sangat didukung oleh masyarakat Jepang karena selama berabad-abad Kaisar menjadi simbol negara yang merupakan perwujudan dari ‘kemerdekaan nasional, kesinambungan sejarah nasional, persatuan nasional, keharmonisan di dalam pemerintah, dan keharmonisan antara pemerintah dan yang diperintah’ (Beasley, 1972). Tidak hanya itu, masyarakat Jepang juga percaya bahwa Kaisar Jepang merupakan keturunan Amaterasu yang merupakan salah satu dewa dalam kepercayaan Shinto.

Pengembalian kekuasaan tersebut diikuti dengan pembacaan *Gokajo no Goseimon* (五箇条の御誓文) atau Piagam Sumpah yang dicetuskan pada 7 April 1868. Secara harfiah, *Gokajo no Goseimon* berarti “Piagam Sumpah dalam Lima Pasal” karena terdiri atas lima (5) pasal yaitu berkaitan dengan keterbukaan politik dan partisipasi public, menghapus kelas-kelas feodal dan mempromosikan persatuan nasional, kebebasan berusaha dan meritokrasi, modernisasi dan penghapusan adat feodal usang, westernisasi dan penerimaan ilmu pengetahuan global. Tujuan utama dari Restorasi Meiji adalah untuk menguatkan kembali Departemen Urusan Shinto (*Jingikan*) yang selama ratusan tahun telah kehilangan maknanya karena Keshogunan Tokugawa merupakan penganut Buddha (Keene, 2002, p. 137).

Keutamaan dari Piagam Sumpah terletak pada pasal keempat dan kelima. Pemerintah Jepang menghimbau masyarakat Jepang untuk meninggalkan seluruh kebijakan dan kebiasaan buruk di zaman feodal Edo. Sementara pasal kelima memerintahkan masyarakat Jepang untuk menuntut ilmu ke seluruh penjuru dunia

sebagai dasar untuk memperkuat fondasi kekuasaan Kekaisaran Jepang.

Pasal kelima dalam Piagam Sumpah tersebut menjadi dasar pembentukan Misi Iwakura yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi. Misi tersebut berjalan selama 18 bulan dari 1871 sampai 1873. Misi Iwakura bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Jepang yang masih sangat jauh tertinggal, sehingga sistem wajib belajar dan memajukan industri militer harus diterapkan (Ong, 2017). Misi Iwakura menghasilkan sebuah peraturan pendidikan negara yaitu wajib belajar bagi seluruh anak-anak. Para perempuan dijamin mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, paling tidak pada tahun pertama.

Sebelum pemberangkatan Misi Iwakura, Kuroda Kiyotaka yang pernah pernah ke luar negeri juga berpendapat bahwa pendidikan merupakan alat yang dapat mengubah orang sekaligus sebagai alat untuk mengubah negara Jepang menjadi negara ideal yang mampu bersaing dengan bangsa Barat. Kuroda melihat pendidikan anak pertama-tama dilakukan oleh para ibu dan Kuroda menyimpulkan bahwa dengan adanya pendidikan perempuan akan menciptakan istri dan ibu yang baik di Jepang (Kume, 2002).

Pada 1871 menyarankan pemerintah Meiji untuk mendidik para perempuan, yaitu dengan mengirimkan mereka ke Amerika Serikat dan pemerintah pun setuju dengan saran Kuroda. Akhirnya, pada tahun yang sama, terpilih lima (5) perempuan yang juga ikut dalam Misi Iwakura, yaitu Ueda Teiko (16 tahun), Yoshimasu Ryoko (16 tahun), Yamakawa Sutematsu (12 tahun), Nagai Shigeko (10 tahun), dan yang paling muda adalah Tsuda Umeko dengan umur 6 tahun (Keene, 2002; Kume, 2002; Sievers, 1983).

Kelima gadis yang ikut dalam Misi Iwakura diperintahkan untuk mempelajari kehidupan rumah tangga Amerika Serikat selama 10 tahun dengan pembiayaan dari pemerintah, mencakup biaya perjalanan,

pendidikan, penunjang kebutuhan pendidikan, pengeluaran untuk kehidupan, dan bahkan tunjangan sebesar 800 dolar Amerika yang dikirim setiap tahun. Permaisuri Haruko juga memberikan perintah kepada kelima gadis tersebut bahwa setelah kembali ke Jepang, mereka harus menjadi teladan bagi semua perempuan di Jepang (Fujimura-Fanselow, 2011; Sekiguchi, 2010; Sievers, 1983).

3.2 Awal dari Pendidikan Perempuan

Pendidikan bagi perempuan Jepang pada masa Edo dilakukan melalui buku-buku bacaan yang bersifat etis, seperti “Onna Daigaku” atau “Onna Kyoukun Shitsukekata”, buku bacaan etis yang akan mengarahkan mereka menjadi seorang wanita yang memiliki etika dan tata krama yang baik.

Pada 1872, sebuah tulisan berjudul “*The Present Order of Undertakings (Tokon Chakushu no Junjo)*” yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan merupakan pendahulu dari *Gakusei* (Kode Dasar Pendidikan) menyampaikan bahwa sama halnya seperti laki-laki, perempuan juga harus menerima pendidikan.

Tidak hanya itu, ada juga tulisan lain yang menyoroti pentingnya pendidikan perempuan, seperti laporan dari *Kaitakushi* pada 1871, tulisan berjudul “*Shinpo (Laporan)*” oleh David Murray pada 1873, dan masih banyak lagi (Koyama, 2013, p. 30). Banyaknya tulisan yang mendukung untuk memberikan pendidikan bagi para perempuan, membuat pemerintah Meiji memperkuat keinginannya untuk menjadikan perempuan sebagai salah satu pilar dalam pembentukan negara yang kuat. Akhirnya, Sekolah Perempuan Tokyo (*Tokyo Jogakko*) dibangun oleh pemerintah Meiji pada Februari 1872 (Meiji tahun ke-5) sebagai sekolah pemerintah perempuan pertama di Jepang (Sievers, 1983, p. 11).

Sekolah Perempuan Tokyo bukan sekolah perempuan biasa, namun sekolah pelatihan bagi para pengajar dan penerjemah wanita. *Tokyo Jogakko* juga

ditujukan untuk para perempuan golongan menengah ke atas, contohnya adalah Hatoyama Haruko yang merupakan seorang putri bungsu kelas bangsawan samurai (Patessio, 2011). Pada saat itu, Hatoyama bahkan mampu untuk pergi ke sekolah dengan menggunakan *jinrikisha* (人力車) atau becak yang ditarik oleh manusia. Hatoyama juga bahkan memiliki kamus Inggris-Jepang yang saat itu tidak dimiliki oleh kebanyakan murid di Jepang. Namun sayangnya *Tokyo Jogakko* ditutup pada 1877 dengan tanpa penjelasan yang jelas. Menurut Hatoyama, pemerintah menutupnya karena permasalahan keuangan dan para murid dipindahkan ke *Tokyo Joshi Shihan Gakkou* yang dibuka pada 1875 (Sievers, 1983).

3.3 Istilah *Ryōsai kenbo* dalam *Meiroku Zasshi* oleh Nakamura Masanao

Pada saat pendidikan modern zaman Meiji dimulai pada 1873, terbentuk sebuah perkumpulan penting dan ternama yang disebut dengan *Meiokusha* (Masyarakat Meiji Enam) yang didirikan oleh beberapa cendekiawan Meiji dengan mengadaptasi pemikiran dari Barat dan memperdebatkan pemikiran mereka tentang masa depan Jepang modern dalam jurnal bernama *Meiroku Zasshi* (Majalah Masyarakat Meiji ke-6). Ada pun nama *Meiokusha* secara harfiah berarti pria-pria pada tahun keenam zaman Meiji. Anggota dari *Meiokusha* meliputi Mori Arinori, Fukuzawa Yuichi, Nakamura Masanao, Nishimura Shigeki, Kato Hiroyuki, Mitsukuri Rinsho, Mitsukuri Shuhei, Nishi Amane, Tsuda Mamichi, dan Sugi Koji.

Berbagai permasalahan di Jepang modern dibahas oleh anggota *Meiokusha* dalam *Meiroku Zasshi*, salah satunya adalah perdebatan tentang sistem keluarga kuno Jepang, yaitu sistem selir pada 1874 yang diangkat oleh Mori Arinori dan Fukuzawa Yuichi. Baik Mori maupun Fukuzawa menyampaikan bahwa sistem selir merupakan sistem yang harus dihapuskan karena hanya akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga.

Fukuzawa yakin bahwa sistem selir hanya didukung oleh pria yang memiliki kesenangan pribadi, sehingga menjadikan mereka kurang manusiawi (Duke, 2009; Sievers, 1983).

Selain keduanya, Nakamura Masanao juga berpendapat dalam publikasi terakhir *Meiroku Zasshi* pada Maret 1875. Tulisannya yang berjudul “*Zenryou Naru Haha o Tsukuru Setsu* (Cara Menciptakan Ibu yang Baik)” mencetuskan istilah ‘*ryōsai kenbo*’ atau ‘istri yang baik dan ibu yang bijaksana’ untuk pertama kalinya (Sievers, 1983, p. 22). Nakamura yang pernah belajar di Inggris melihat bagaimana anak-anak di Inggris mampu menjawab pertanyaan yang sulit karena ibu mereka mendapatkan pendidikan yang baik (Patessio, 2011, p. 3).

Nakamura Masanao (1832-1891) merupakan seorang pelajar Konfusianisme yang pergi ke Inggris untuk mempelajari budaya Barat dan akhirnya memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada 1874 (Yamaji et al., 1999). Nakamura yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat, berpendapat bahwa perempuan harus dibekali dengan pendidikan agama dan moral agar dapat mendidik anak-anaknya, sekaligus berperan sebagai ‘setengah lebih baik’ daripada suami mereka. Nakamura juga menambahkan:

We can then have people trained in religious and moral education as well as in the sciences and arts whose intellects are advanced, whose minds are elevated, and whose conduct is high. . . Envyng the enlightenment of Europe and America, I have a deep, irrepresible desire that later generations shall be reared by fine mothers. (Sievers, 1983, p. 23)

(Dengan demikian, kita dapat memiliki orang-orang yang terlatih dalam pendidikan agama dan moral serta ilmu pengetahuan dan seni, yang memiliki kecerdasan tinggi, pemikiran yang luas, dan akhlak yang

mulia. . . Karena iri dengan kemajuan di Eropa dan Amerika, saya memiliki keinginan yang sangat dalam dan tak tertahankan bahwa generasi mendatang sebaiknya dibesarkan oleh para ibu yang baik.)

Berdasar pada kata “setengah” yang dinyatakan oleh Nakamura, penulis berpendapat bahwa para perempuan diharapkan menjadi sosok yang ‘setengah lebih baik’ dari suaminya karena perempuan menjadi pusat dari berjalannya suatu rumah tangga. Tidak hanya bertugas untuk membantu pekerjaan suami mereka, para perempuan juga diharap menjadi sosok yang selalu ada dan siap ketika suami mereka membutuhkan mereka. Para perempuan juga diharuskan untuk mampu merawat dan mendidik anak-anak mereka. Namun, para perempuan yang harus lebih baik dari suami mereka hanya terbatas sampai ranah domestik saja, karena mereka tidak diizinkan untuk melampaui ranah yang dikendalikan oleh suami mereka, yaitu di ranah publik.

Tercetusnya istilah ‘*ryōsai kenbo*’ tentunya membuat beberapa perubahan dalam masyarakat mengingat bahwa *Meiroke Zasshi* memiliki pengaruh yang cukup luas di Jepang. Untuk pertama kalinya, perempuan dianggap sebagai sosok pelindung dan pendidik yang sebenarnya bagi anak-anak. Istilah ‘*ryōsai kenbo*’ menjadi ideologi yang menggambarkan ‘pemikiran modern’, ‘produk modern’, dan ‘inovasi modern’ ketika zaman Meiji (Sekiguchi, 2010; Sievers, 1983, p. 23). Perubahan budaya dan integrasi ekonomi Jepang berpengaruh pada kondisi rumah tangga tradisional Jepang, nilai-nilai patriarki, peranan dan struktur keluarga. *Ryōsai kenbo* melahirkan konfusianisme baru yang dijadikan sebagai standar wanita Jepang pada masa Meiji.

Nakamura menjelaskan bagaimana ibu yang memiliki pendidikan baik akan menciptakan anak-anak yang luar biasa dengan pengetahuan yang tinggi, sifat yang

baik, dan perilaku yang mulia. Anak-anak yang luar biasa tentunya akan mengubah Jepang menjadi negara yang beradab, jaya, dan maju seperti negara-negara Barat (Koyama, 2013).

Berkat tulisan Nakamura, pemerintah maupun masyarakat mulai memikirkan peran perempuan di Jepang. Saran dari Misi Iwakura memberikan dampak yang signifikan terhadap pemikiran masyarakat tentang pentingnya peran dan kehadiran perempuan (Ambros, 2015; Sievers, 1983).

3.4 Perkembangan *Ryōsai kenbo* oleh Mori Arinori

Kemunculan ideologi *ryōsai kenbo* di Jepang yang dicetuskan oleh Nakamura, selanjutnya dikembangkan oleh Mori Arinori ketika menjadi Menteri Pendidikan pada 1885. Mori Arinori (1847-1889) lahir dari keluarga samurai klan Satsuma yang bertentangan dengan pihak Tokugawa. Mori pergi ke Inggris secara rahasia pada 1865 dan belajar di Universitas London. Selama menjadi Menteri Pendidikan, Mori sering memasukkan unsur Barat dalam pendidikan (Morikawa, 1989).

Keputusan Mori untuk memasukkan unsur-unsur Barat dalam pendidikan Jepang sering mendapat pertentangan dari para penganut Konfusius. Ajaran Konfusianisme kembali menguat pada zaman Meiji yang awalnya melakukan Restorasi Meiji untuk mengembalikan kekuatan kepercayaan Shinto yang kehilangan maknanya selama era Keshogunan Tokugawa.

Meskipun agama Kristen telah diizinkan di Jepang, istilah *ryōsai kenbo* tidak serta merta langsung diterima oleh pemerintah Meiji saat itu karena konsep *ryōsai kenbo* berawal dari pemikiran Nakamura yang dipengaruhi oleh Barat dengan mengadopsi konsep ‘*good wife and wise mother*’ yang muncul di negara-negara Barat. Para cendekiawan Konfusianisme menganggap bahwa budaya Barat atau westernisasi yang berlebihan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat Jepang.

Selama zaman Meiji, pemerintah bahkan menggunakan slogan “*Fukoku Kyohei*” atau berarti “Negara Kaya, Tentara Kuat” yang berasal dari frasa kuno Tiongkok (Holcombe, 2001). Pemerintah juga menggunakan kata “*bunmei kaika*” yang berarti ‘pembangunan dan pembaharuan’ dengan dasar ajaran Konfusianisme. Didasari oleh slogan “*Fukoku Kyohei*” dan kata “*Bunmei Kaika*”, pendidikan menjadi fondasi utama dari pembangunan Jepang yang kuat dan maju. Pada 1887, Mori pun mereformasi ulang pendidikan perempuan untuk melatih mereka menjadi sosok *ryōsai kenbo*. Tujuannya untuk membentuk watak perempuan yang baik (*ryousai*) dan ibu yang bijaksana (*kenbo*), serta an melatih bakat perempuan agar mampu untuk melaksanakan tugas membesarkan anak-anak dan mengurus rumah tangga. Menurut Mori dasar dari kekayaan nasional adalah pendidikan dan fondasi (konpon) dari pendidikan adalah pendidikan perempuan, berhasil tidaknya pendidikan perempuan berhubungan dengan sejahtera atau tidaknya suatu bangsa (Mackie, 2003, p. 25)

Mori menganggap bahwa pendidikan perempuan menjadi tonggak dasar dari pendidikan yang merupakan fondasi utama dari kekayaan nasional. Sesuai dengan slogan “*Fukoku Kyohei*”, Mori Arinori menggunakan pendidikan perempuan sebagai cara untuk meyejahterakan bangsa.

Era Meiji memberi pengaruh yang signifikan pada beberapa tatanan sosial, politik dan keagamaan. Keinginan untuk mengantarkan Jepang menjadi “negara beradab”, tatanan politik dengan pola pikir maju dan intelektual mendorong perubahan dalam bidang bahasa, sastra, musik, teater, busana, tata negara, dan pendidikan. Tanpa terkecuali perempuan, menjadi objek perubahan. Didorong oleh sebuah keyakinan negara Barat, para pembaharu percaya bahwa peradaban suatu bangsa diukur berdasarkan status perempuan yang dimiliki bangsa tersebut.

3.5 Amanat Kaisar Tentang Pendidikan (*Kyouiku Chokugo*)

Pendidikan perempuan kemudian juga didasari oleh *Kyouiku Chokugo* (教育ニ関スル勅語) atau Amanat Kaisar Tentang Pendidikan yang ditandatangani oleh Kaisar Meiji pada 30 Oktober 1890. Kemunculan *Kyouiku Chokugo* diawali oleh pengakuan para pemimpin pemerintah Meiji bahwa kehidupan cendekiawan di Jepang menjadi kacau, contohnya adalah konflik antara pengikut agama Kristen yang bertambah dan para penganut Japanisme yang juga gigih. Akibatnya, para pejabat mulai khawatir bahwa hal tersebut akan menyebabkan masyarakat terpecah belah secara ideologis. Pemerintah Meiji kemudian memutuskan untuk membendung ‘kebingungan publik, kemerosotan moral, dan kelonggaran dalam disiplin sosial’ dengan menyusun Amanat Kaisar Tentang Pendidikan (*Kyouiku Chokugo*) yang mengambil model dari Amanat Kaisar Untuk Prajurit dan Pelaut pada 1882 (Horio, 1933, pp. 66–68).

Amanat Kaisar yang tertuang dalam *Kyouiku Chokugo* secara langsung memerintahkan rakyat Jepang bahwa mereka harus selalu bersatu karena dengan cara tersebut akan memuliakan Kekaisaran (Jepang). Memuliakan negara merupakan bentuk pengabdian kepada negara sekaligus terhadap Kaisar. Perintah bahwa masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengejar ilmu pengetahuan sekali lagi dipertegas dalam *Kyouiku Chokugo*, seperti yang telah disampaikan dalam Piagam Sumpah. Tidak hanya pendidikan, Kaisar juga memerintahkan rakyatnya untuk selalu menghormati Konstitusi atau pemerintah Meiji dan mematuhi hukum, yang artinya seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus ditaati oleh masyarakat.

Didasari oleh perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Mori Arinori dan didukung oleh *Kyouiku Chokugo*, maka perempuan diperintahkan untuk memperoleh pendidikan *ryōsai kenbo*

untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib. Kondisi masyarakat yang tertib dapat terbentuk ketika masyarakat menjalankan tugas atau fungsi sesuai dengan struktur yang terikat oleh peraturan atau ideologi dari bangsa tersebut. Ketika masyarakat telah menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, maka keseimbangan dan keharmonisan akan terbentuk dan negara yang kuat akan terwujud.

Kyōiku Chokugo menunjukkan bahwa struktur negara Jepang di zaman Meiji sejalan dengan teori struktural-fungsional. Unsur penting dalam pembentukan negara yang kuat berasal dari rakyat baik itu laki-laki maupun perempuan, pemerintah atau Konstitusi, dan Kaisar sebagai pemangku kekuasaan tertinggi. Dimulai dari struktur yang paling bawah, yaitu rakyat yang terbagi atas laki-laki untuk bekerja di luar rumah dan berurusan dengan ranah publik, sementara perempuan yang bertanggung jawab untuk mengurus domestik dan mendidik anak, kemudian pemerintah atau Konstitusi yang bertugas untuk mengatur rakyatnya, serta Kaisar sebagai simbol yang menjadi acuan bagi rakyat untuk menjalankan segala perintahnya.

3.6 Kemenangan Jepang atas Perang Sino-Jepang ke-I

Menjelang 1890-an, terjadi beberapa perubahan, salah satunya peningkatan ketertarikan terhadap pendidikan perempuan yang didukung oleh beberapa kelompok. Meskipun begitu, pendidikan perempuan belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat maupun oleh kebijakan pemerintah. Namun, Perang Sino-Jepang ke-I yang terjadi pada 1894-1895, justru meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Jepang, sehingga kehadiran *ryōsai kenbo* dalam pendidikan perempuan menjadi urgensi pemerintah Meiji.

Pemerintah melihat bahwa kemenangan Jepang pada Perang Sino-Jepang ke-I merupakan hasil kerja sama antar masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika para laki-laki sibuk

mengabdikan diri mereka untuk pergi berperang, para perempuan bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka agar siap jika suatu waktu dipanggil untuk ikut berperang. ideologi propaganda nasional, sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang dikirim ke medan perang dengan mengatur keuangan dan rumah tangga, bentuk kontrol sosial di mana ideologi digunakan sebagai bentuk kontrol terhadap perilaku perempuan dan memberikan dukungan untuk mengurangi kecemasan di ranah domestik ketika kaum laki-laki ditugaskan ke medan perang?

Saat itu, pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa peran perempuan juga menjadi sangat penting. Penulis melihat bahwa kemenangan Jepang pada Perang Sino-Jepang ke-I menunjukkan pembagian peran yang sesuai akan menghasilkan kekuatan, sesuai dengan teori struktural-fungsional.

Jumlah kehadiran siswi sekolah dasar ikut melonjak, yaitu dari 45% di tahun 1895 menjadi 59% pada 1899. Dampak dari meningkatnya jumlah kehadiran siswi sekolah dasar yaitu, pemerintah Meiji akhirnya mengeluarkan *Koto Jogakko Rei* (Undang-Undang Sekolah Menengah Pertama Perempuan) pada 8 Februari 1899 dan efektif berjalan pada bulan April, yang mengangkat *ryōsai kenbo* menjadi kepentingan bagi pendidikan perempuan (Koyama, 2013, p. 36). Kabayama Sukenori yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan saat itu juga memerintahkan para pejabat prefektur untuk mengembangkan masyarakat kelas menengah yang sehat tidak dapat dicapai hanya dengan pendidikan (formal) laki-laki; kontribusi ibu yang bijaksana dan istri yang baik (*kenbo ryōsai*) juga diperlukan menertibkan rumah tangga dan memajukan kesejahteraan masyarakat (Koyama, 2013, p. 42).

Sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Kabayama, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh Jepang adalah dengan memperbaiki pendidikan

perempuan yang merupakan kelemahan utama dalam sistem pendidikan Jepang saat itu. Kelemahan tersebut tidak dapat menciptakan kondisi negara yang seimbang dan kuat. Kelemahan pada salah satu subsistem negara, tentunya akan menyebabkan subsistem lainnya ikut terpengaruh. Dalam arti lain, lemahnya pendidikan sebagai salah satu subsistem pada suatu negara, juga akan memperlemah subsistem lainnya.

Terbitnya *Koto Jogakko Rei* memberikan status resmi terhadap sekolah menengah perempuan sehingga memiliki status yang sama dengan sekolah menengah umum. Selain itu, pemerintah juga meresmikan setidaknya satu (1) Sekolah Menengah Atas (*Koto Jogakkou*) di setiap prefektur dengan masa belajar selama 4 tahun. Sebelumnya, hanya terdapat 5 sekolah dengan jumlah murid sekitar 286 murid pada 1882, kemudian 31 sekolah dengan jumlah murid 3.120 pada 1890, dan akhirnya naik menjadi 34 sekolah dengan jumlah murid 7.154 murid pada 1898 (Patessio, 2013). Sharon dan Sally (1983) mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberikan efek yang luar biasa dalam meningkatkan jumlah sekolah negeri perempuan tingkat tinggi dan mempersempit cakupan pendidikan yang ditawarkan kepada perempuan.

3.7 Ideologi *Ryōsai kenbo* Bagi Negara

Pada zaman Meiji, pemerintah juga menggunakan ideologi “*Kazoku Kokka*” atau bermakna ‘negara keluarga’. Koyama (2013, p. 3) menjelaskan bahwa ideologi tersebut melihat bagaimana struktur masyarakat Jepang terbentuk sebagai ‘sebuah keluarga’. Contohnya adalah hubungan antara Kaisar dengan rakyatnya yang digambarkan sebagai ‘ayah dan anak’ atau hubungan antara keluarga kekaisaran dengan keluarga individu yang digambarkan sebagai ‘rumah tangga utama (*honke*) dan rumah tangga cabang (*bunke*)’. Penggambaran struktur masyarakat melalui ideologi “*Kazoku Kokka*” membuat masyarakat Jepang harus patuh terhadap

seluruh perintah dari ‘ayah’ atau sang Kaisar, termasuk pendidikan perempuan yang diterapkan dalam konsep atau ideologi *ryōsai kenbo*.

Saat ideologi *ryōsai kenbo* dikembangkan oleh pemerintah Meiji, *ryōsai kenbo* justru menjadi berkaitan erat dengan nilai-nilai kekeluargaan tradisional di Jepang, sistem keluarga *Ie*. Sistem keluarga *Ie* diresmikan dalam Undang-Undang Dasar Meiji bagi seluruh golongan masyarakat, tidak seperti ketika zaman Edo dimana sistem keluarga *Ie* hanya berlaku bagi kelas samurai dan kelas bangsawan.

Sistem keluarga *Ie* kemudian membentuk konsep keluarga yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga dan bekerja di luar rumah atau publik, sementara perempuan menjadi seorang istri sekaligus ibu yang mengurus rumah tangga atau domestik dan merawat serta mendidik anak di rumah.

Ideologi *ryōsai kenbo* dengan dasar sistem keluarga *Ie* yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sesuai dengan konsep gender yang digambarkan oleh ajaran dari Tiongkok, yaitu laki-laki sebagai *yin* dan perempuan sebagai *yang*. Para laki-laki (*yin*) selalu terhubung dengan hal-hal yang bersifat aktif, pelindung, dan pemimpin dari keluarga, yaitu dengan bekerja di luar rumah. Sementara itu, para perempuan (*yang*) dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat pasif, bergantung, dan sebagai pengasuh di dalam keluarga, yaitu bertugas untuk merawat anak.

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan struktur tersebut sesuai dengan teori struktural-fungsional. Seperti yang disampaikan oleh Dalimoenthe (2020) bahwa gender berkaitan dengan ideologi sebuah bangsa, maka peran gender juga ditentukan oleh masyarakat dan budaya dari bangsa itu sendiri. Jepang pada zaman Meiji membagi peran gender sesuai dengan konstruksi sosial saat itu yang terdiri dari Kaisar, pemerintah atau Konstitusi, dan

masyarakat. Pemerintah meyakini bahwa negara yang kuat dapat terbentuk ketika peran setiap unsur negara sesuai dengan strukturnya, yaitu dimulai dari Kaisar, pemerintah atau pemegang kekuasaan, serta masyarakat Jepang yang terbagi atas laki-laki dan perempuan.

Pembagian peran atau fungsi yang sesuai dengan struktur negara Jepang pada zaman Meiji sesuai dengan teori struktural-fungsional yang dipaparkan oleh Parsons. Keadaan yang harmonis atau seimbang dapat tercipta ketika fungsi dari laki-laki dan perempuan sesuai dengan struktur hierarki. Laki-laki dengan perannya untuk mencari nafkah dan mengabdikan diri mereka dengan ikut berperang, sementara para perempuan berperan sebagai istri di rumah dengan mengurus ranah domestik, sekaligus menjadi ibu yang mendidik anak-anaknya. Masyarakat Jepang memahami bahwa pembagian peran itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Kaisar dan negara agar mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara.

4. Simpulan

Pembentukan ideologi *ryōsai kenbo* di Jepang berkaitan erat dengan agama dan kepercayaan di Jepang karena Kaisar Jepang dianggap sebagai keturunan dewa. Ideologi *ryōsai kenbo* yang lahir dari pemikiran Nakamura Masanao berdasarkan konsep dari Barat akhirnya harus disesuaikan dengan ajaran Konfusianisme dan Shinto yang ada di Jepang. Ideologi *ryōsai kenbo* didasari oleh Piagam Sumpah pada 1868, Amanat Kaisar Tentang Pendidikan (*Kyouiku Chokugo*) pada 1890, dan Undang-Undang Sekolah Menengah Pertama Perempuan (*Koto Jogakko Rei*) pada 1899.

Berdasarkan analisis dengan teori struktural-fungsional, terlihat bahwa struktur sosial Jepang terdiri atas beberapa elemen penting yang saling memengaruhi, dari Kaisar yang menduduki posisi tertinggi, pemerintah atau Konstitusi, dan masyarakat. Setiap elemen tersebut memiliki fungsi dan peran sesuai dengan

struktur hierarki masyarakat Jepang yang diikat melalui ideologi Keluarga Nasional (*Kazoku Kokka*) dan sistem keluarga *Ie*, yaitu Kaisar sebagai ‘ayah’ dan masyarakat sebagai anak-anak yang arus patuh terhadap seluruh amanatnya. Berdasarkan amanat yang telah disampaikan oleh Kaisar, pemerintah atau Konstitusi membentuk kebijakan yang kemudian harus dipatuhi oleh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kebijakan dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya, salah satunya adalah melalui ideologi *ryōsai kenbo* bagi para perempuan Jepang.

Ideologi *ryōsai kenbo* memperkuat peran perempuan dibidang domestik, memunculkan banyak sekolah wanita, dan tumbuhnya kesadaran pentingnya kehadiran wanita untuk membangun negara. Laki-laki Jepang yang ikut berperang meninggalkan negaranya, sementara perempuan yang tinggal di negara berperan penting dalam ranah domestik, yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi sosok yang berguna bagi masa depan. Meskipun pembagian peran sesuai struktur memberikan dampak berupa domestikasi wanita, namun pembagian peran menunjukkan adanya sistem masyarakat yang *interconnected* sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjaga kestabilan suatu negara, meskipun demikian tetap saja ideologi ini bagian dari domestikasi perempuan yang hanya berperan dalam urusan rumah tangga saja

Referensi

- Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ar Ruzz.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Dr. P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Ambros, B. R. (2015). *Women in Japanese Religions*. New York University Press.

- Beasley, W. G. (1972). *The Meiji Restoration*. Stanford University Press.
- Bowring, R. (2005). *The Religious Traditions of Japan 500-1600*. Cambridge University Press.
- Clark, K. J., & Wang, R. R. (2004). A Confucian Defense of Gender Equity. *Journal of the American Academy of Religion*, 72(2), 395–422.
<https://doi.org/10.1093/jaarel/lfh03>
- Dalimoenthe, I. (2020). *Sosiologi Gender* (B. S. Fatmawati, Ed.). Bumi Aksara.
- Duke, B. C. (2009). *The History of Modern Japanese Education: Constructing the National School System, 1872-1890*. Rutgers University Press.
- Fujimura-Fanselow, K. (Ed.). (2011). *Transforming Japan: How Feminism and Diversity Are Making a Difference*. The Feminist Press at CUNY.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah* (S. Historika, Ed.).
- Holcombe, C. (2001). *The Genesis of East Asia, 221 B.C.-A.D. 907*. University of Hawaii Press.
- Horio, T. (1933). *Educational Thought and Ideology in Modern Japan: State Authority and Intellectual Freedom* (S. Platzer, Ed.). University of Tokyo Press.
- Humairah, S. S., & Dewi, A. U. (2025). Nilai-nilai Konfusianisme dan Stagnasi Perkembangan Gerakan Feminisme di Korea Selatan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 40–54.
<https://doi.org/10.24198/padjir.v7i1.54113>
- Keene, D. (2002). *Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852-1912*. Columbia University Press.
- Koyama, S. (2013). *Ryōsai Kenbo*. BRILL.
<https://doi.org/10.1163/9789004244351>
- Kume, K. (2002). *The Iwakura Embassy, 1871-1873: A True Account of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary's Journey of Observation through the United States of America and Europe* (G. Healey & T. Chushichi, Eds.). Routledge.
- Lukminaitė, S. (2015). Developments in Female Education of Meiji Japan: As Seen from Jogaku Zasshi's Editorials by Iwamoto Yoshiharu. *Analele Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir, Seria Stiintele Limbii, Literaturii Si Didactica Predarii*, 1, 9–22.
- Mackie, V. (2003). *Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality* (Y. Sugimoto, Ed.; Vol. 1937). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511470196>
- Molony, B., & Uno, K. (Eds.). (2005). *Gendering Modern Japanese History*. Harvard University Asia Center.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt1tg5pmc>
- Morikawa, T. (1989). Mori Arinori. In Benjamin C. Duke (Ed.), *Ten Great Educators of Modern Japan: A Japanese Perspective* (pp. 39–65). University of Tokyo Press.
- Novianti, Y. (2015). *Peranan Wanita Jepang Sebagai Ryosai Kenbo pada Zaman Meiji*. Universitas Sumatera Utara.
- Ong, S. (2017). *Seikatsu Kaizen: Reformasi Pola Hidup Jepang*. Elex Media Komputindo.
- Patessio, M. (2011). *Women and Public Life in Early Meiji Japan: The Development of the Feminist Movement*. U of M Center For Japanese Studies.
<https://doi.org/10.3998/mpub.9340032>
- Patessio, M. (2013). Women getting a “university” education in Meiji

- Japan: Discourses, realities, and individual lives. *Japan Forum*, 25(4), 556–581. <https://doi.org/10.1080/09555803.2013.788053>
- Sekiguchi, S. (2010). Confucian Morals and the Making of a “Good Wife and Wise Mother”: From “Between Husband and Wife there is Distinction” to “As Husbands and Wives be Harmonious.” *Social Science Japan Journal*, 13(1), 95–113. <https://doi.org/10.1093/ssjj/jyp046>
- Sievers, S. L. (1983). *Flowers in Salt: The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan*. Stanford University Press.
- Wasino, & Hartatik, E. S. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset hingga Penulisan* (P. Sudarmo, Ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Yamaji, A., Squires, G., & Squires, G. (1999). *Essays on the Modern Japanese Church*. U of M Center For Japanese Studies. <https://doi.org/10.3998/mpub.22854>